



**PENYIDIKAN PEREDARAN ILEGAL PIL TRIHEXYPHENIDYL OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN (BPOM) YOGYAKARTA**

Oleh: Drean Valencia Timely¹ dan Niken Subekti Budi Utami²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM Yogyakarta dalam perkara peredaran ilegal pil Trihexyphenidyl, hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan peredaran ilegal pil Trihexyphenidyl, serta solusi terhadap hambatan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Balai Besar POM Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Yogyakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian sebagai berikut, pertama, penanganan perkara pil Trihexyphenidyl oleh PPNS BPOM Yogyakarta dimulai dari wasmatlitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan) setelah mendapatkan laporan. Penyidikan akan dimulai apabila setelah wasmatlitrik, perkara tersebut ditetapkan naik sidik. Berkas perkara penyidikan yang telah selesai dilimpahkan kepada penuntut umum melalui Korwas PPNS. Proses wasmatlitrik hingga penyidikan dilakukan dengan koordinasi bersama kepolisian. Kedua, hambatan yang dihadapi PPNS BPOM Yogyakarta meliputi hambatan dari dalam BPOM Yogyakarta yakni, terbatasnya SDM dan keterbatasan mengoperasikan alat-alat teknis, serta hambatan dari luar PPNS BPOM Yogyakarta yakni, keterbatasan dalam melakukan upaya paksa dan modus operandi pelaku yang semakin canggih. Solusi atas hambatan tersebut dengan memperbaiki komponen-komponen penegakan hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Kata Kunci: Penyidikan, PPNS BPOM Yogyakarta, Peredaran Ilegal, Pil Trihexyphenidyl.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



INVESTIGATION OF ILLEGAL DISTRIBUTION OF TRIHEXYPHENIDYL PILLS BY CIVIL SERVANT INVESTIGATORS OF THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY (BPOM) IN YOGYAKARTA

By: Drean Valencia Timely³ and Niken Subekti Budi Utami⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the investigation process carried out by PPNS BPOM Yogyakarta in the case of illegal circulation of Trihexyphenidyl pills, obstacles faced in the investigation process of illegal circulation of Trihexyphenidyl pills, and solutions to these obstacles.

This type of research is an empirical legal research method. The research location is at the BPOM Yogyakarta and the Yogyakarta Regional Police. The types of data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with research subjects. Secondary data was obtained from literature studies. The data obtained was then analyzed with a qualitative descriptive method.

The research conclusions are as follows, first, the handling of Trihexyphenidyl pill cases by PPNS BPOM Yogyakarta starts from wasmatlitrik (supervision, observation, research, and examination) after receiving a report. The investigation will begin if after the wasmatlitrik, the case is determined to be investigated. The completed investigation case file is submitted to the public prosecutor through the Korwas PPNS. The process of wasmatlitrik to investigation is carried out in coordination with the police. Second, the obstacles faced by PPNS BPOM Yogyakarta include obstacles from within BPOM Yogyakarta, namely, limited human resources and limitations in operating technical equipment, as well as obstacles from outside BPOM Yogyakarta PPNS, namely, limitations in making forced efforts and the modus operandi of increasingly sophisticated perpetrators. The solution to these obstacles is to improve the components of law enforcement, namely legal structure, legal substance, and legal culture.

Keywords: *Investigation, PPNS BPOM Yogyakarta, Illegal Distribution, Trihexyphenidyl Pills.*

³ Undergraduate Student of Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Criminal Law Lecturer in Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.